

Bamus Sunda Usulkan Mulok Budaya Sunda

BANDUNG, (PR).-

Badan Musyawarah Masyarakat Sunda Jawa Barat mengusulkan muatan lokal bahasa Sunda diubah menjadi mulok budaya Sunda. Hal ini dilakukan seiring mulai memudarnya budaya Sunda di kalangan generasi muda.

"Selain lemahnya kemampuan berbahasa Sunda, sikap dan perilaku sebagai orang Sunda yang *nyunda* sudah hampir hilang. Begitu pula sikap silih asah, silih asih, dan silih asuh, sudah hampir hilang. Tata cara bersikap kepada orangtua dan orang yang lebih tua serta kepada teman sepermainan nyaris sama. Demikian juga minat terhadap kesenian tradisional sangat berkurang," kata Koordinator Bidang Pendidikan Bamus Jabar Iwan Hermawan, Jumat (14/9).

Menurut dia, usulan untuk meningkatkan kurikulum mulok bahasa Sunda menjadi budaya Sunda ini untuk mencegah terus memudarnya budaya Sunda. Jika ditingkatkan menjadi mulok budaya Sunda, siswa dapat memperoleh berbagai pembelajaran, termasuk pengalaman dengan mengunjungi kampung adat Sunda.

Terancam punah

Sementara itu, Ketua Umum Paguyuban Pasundan yang juga Rektor Universitas Pasundan Prof Didi Turmudzi menuturkan, saat ini memang makin sedikit generasi muda yang menggunakan bahasa ibu. Bahkan di tingkat dunia pun, ratusan bahasa ibu punah karena semakin sedikit penuturnya.

"Semestinya pelestarian ini dimulai dari keluarga. Dalam bidang pendidikan pun seperti ini ada kesalahan metodologi karena mungkin anak-anak tidak mempraktikannya dengan kawan-kawan sebaya sehingga terancam hilang," ujarnya.

Menurut Didi, pendirian Akademi Budaya Sunda di Unpas pun salah satunya sebagai upaya untuk mencegah kepunahan ini. Di dalam akademi ini dipelajari berbagai pemahaman unsur budaya Sunda dari berbagai aspek. "Mulai dari materi tentang teknologi, ekonomi, lingkungan, sosial, seni dan lainnya. Yang terlibat ada guru besar ITB, Unpad, Unpas, dari Jepang juga," katanya.

Didi menambahkan, sebetulnya pemerintah juga sudah berupaya dengan melahirkan peraturan daerah mulai dari tingkat provinsi sampai kota. Namun sejak perda provinsi disahkan pada 2005, tidak ada pengaruhnya. (A-157)***